

**Briefing Sheet**  
**PENYUSUNAN RENCANA AKSI GERAKAN BERSAMA**  
**PENGEMBANGAN FITOFARMAKA**

**Kepada** : Kepala Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan  
**Dari** : Timjak Sistem Ketahanan Farmasi  
**Perihal** : Dispo Rapat Undangan Dir. Hanfarmalkes, Zoom meeting  
(<https://link.kemkes.go.id/RenaksiFitofarmaka>)  
**Hari / Tgl** : Selasa / 5-6 September 2023  
**Waktu** : 09.00 WIB – selesai

=====

Berdasarkan dispo undangan Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan tanggal 30 Agustus 2023 perihal tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan tersebut diikuti oleh Novi Sulistyaningrum.
2. Obat Herbal Terstandar dan fitofarmaka masuk ke dalam prioritas riset nasional.
3. Satgas Percepatan dan Pengembangan Fitofarmaka dibina oleh Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian, terdiri atas lintas K/L, dibentuk untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan output yang disepakati untuk pencapaian bersama dalam pengembangan fitofarmaka.
4. Satgas fitofarmaka terdiri atas 5 Bidang:
  - a. Bidang I - Bahan Baku
  - b. Bidang II – Teknologi Manufaktur dan Standardisasi
  - c. Bidang III – Uji Klinik dan Pra Klinik
  - d. Bidang IV – Pengembangan Yankestrad
  - e. Bidang V – Produksi dan Promosi Fitofarmaka)
5. Pada pertemuan tersebut dilakukan diskusi kelompok dengan luaran optimalisasi satgas lintas program. Pusjak SKK dan SDK masuk ke dalam grup diskusi satgas fitofarmaka bidang V, terkait dengan output Rekomjak Fitofarmaka Tahun 2022.
6. Pasar paling besar untuk fitofarmaka adalah dapat masuk ke dalam JKN.
7. Alternatif kebijakan dalam *policy brief* Fitofarmaka yang dihasilkan oleh Pusjak SKK dan SDK Tahun 2022 telah dimasukkan ke dalam program percepatan dan pengembangan fitofarmaka, yaitu:

- Usulan studi farmakoekonomi/*Health Technology Assessment* (HTA) untuk fitofarmaka yang dapat bersaing dengan competitor sebagai salah satu persyaratan untuk dapat masuk JKN (Penguatan regulasi fitofarmaka dalam standar pelayanan farmasi di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan).
  - Regulasi fitofarmaka untuk masuk ke dalam Pedoman Praktik Klinis (PPK) dan Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan (PNPK) (Pencantuman fitofarmaka dalam regulasi standar pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan).
8. Instrumen lengkap hasil diskusi terlampir dalam nota dinas ini.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih.